

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Rosa, 2012, *Hukum Perikatan (Law of obligations)*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Dua, Mikhael, 2007, *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Analitis, Dinamis, dan Dialektis*, Ledalero, Maumere.
- _____, 2002, *Pendaftaran Tanah Indonesia*, Bandung, Mandar Maju .
- Harsono, Boedi, 1997, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi, Djambatan, Jakarta.
- _____, 2003, *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, jilid I, *Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta
- _____, 2008, *Hukum agraria: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hawari, Dadang, 2012, *Kecerdasan Ruhaniah (Transendental Intelligence): Membentuk Kepribadian yang Bertanggung Jawab Profesional, dan Berakhlak*. Gema Insani Perss, Jakarta.

- Huda, Chairul, 2016, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Hunnex, Milton D, 2004, *Peta Filsafat Pendekatan Kronologis dan Tematis (judul asli: Chronological and Thematic Charts of Philosophies and Philosophers)*, Cetakan Pertama Teraju, Jakarta
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi,2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Komariah, 20011, *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Universitas Muhamadiyah Malang press, Malang.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Munir, Abdullah. 2010. *Pendidikan Karakter (Membangun Karakter Anak Sejak Dari Rumah)* Pedagogia, Yogyakarta
- Mustari, Mohamad,2011,*Karakter Refleksi Untuk Pendidikan Karakter*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Parlindungan, A. P., 1991, *Komentor atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*,Cetakan ke 10, Sumur Bandung, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sangsun, Florianus Sp, 2007, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia,
Jakarta.

Simarmata, Rikardo, 2006, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di
Indonesia*, UNDP Regional Centre, Bangkok.

Suardi, 2005, *Hukum Agraria*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta

Sufriadi, 2014 “*Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*,” Jurnal Yuridis,

Sugiarto, Agus dan Teguh Wahyono. 2005. *Manajemen Kearsipan Modern*.
Gava Media. Yogyakarta.

Sumardjono, Maria SW 1998, *Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam
Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara*, dalam Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM, tanggal 14 Februari 1998
di Yogyakarta.

Suriasumantri, Jujun S, 2005, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cetakan
ke-18, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Suseno, Frans Magnis, 1993, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian, 2014, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta

Tjondronegoro, Sediono MP, & Gunawan Wiradi, 1998, *Dua Abad Penguasaan
Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*,
Yayasan Obor Indonesia dan Gramedia, Jakarta

Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

_____, 2013, *Hukum Agraria*, Kencana, Jakarta.

Utama, Yos Johan, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Terbuka,
Tangerang selatan.

Wibowo, Agus, 2012, Pendidikan Karakter Strategi Membangun Karakter
Kepribadian Bangsa, Pustaka pelajar, Yogyakarta.

Wignyosoebroto, Soetandyo, 1994, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional:
Dinamika Sosio-Politik Perkembangan Hukum di Indonesia*, Rajawali
Press, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun
2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11
Tahun 2016 tentang penyelesaian Kasus Pertanahan

C. Makalah

Elok Puspa Arum, “Tanggung Jawab Notaris Atas Pengesahan dan Pembukuan Surat Dibawah Tangan”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Anak Agung Ayu Dyah Kumala Ratih, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Materiil dalam Akta yang di buatnya di Denpasar”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2007.

Sri Widiyanti, “Pertanggungjawaban notaris atau PPAT pada akta yang di buatnya, studi kasus di Kabupaten Purworejo”, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2008.

C. Internet

http://inspirasihukum.com/2011/04/pertanggung-jawaban-administrasi-negara_23.html Diakses tanggal 01 November 2018

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1210/sengketa-kepemilikan-tanah>.
Diakses tanggal 01 November 2018